
PARTISIPASI POLITIK GURU DALAM PEMILUKADA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA GURU DI KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATAN

St. Syamsudduha dan Nursalam

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa

Email: syamsudduha@yahoo.com

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi guru dalam kegiatan perpolitikan di Kabupaten Takalar Prov. Sulawesi Selatan, untuk mengetahui kinerja guru yang terlibat dalam kegiatan perpolitikan di Kabupaten Takalar Prov. Sulawesi Selatan, dan untuk mengetahui hubungan antara partisipasi guru dalam politik dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran. Populasi penelitian ini adalah guru di Kabupaten Takalar dan sampel penelitian ini adalah guru SD, SMP, dan SMA pada beberapa kecamatan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, pedoman wawancara, dan catatan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi guru dalam kegiatan perpolitikan di Kabupaten Takalar yaitu: kampanye, pemberian suara pilkada/partai, diskusi publik, dan mengemukakan opini di media massa. Kinerja guru-guru yang terlibat dalam kegiatan perpolitikan di Kabupaten Takalar berada dalam kategori sedang, dengan rata-rata kinerja guru sebesar 68.35. Tidak ada hubungan yang signifikan antara partisipasi guru dalam politik dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran.

Abstract:

The purpose of this study was (1) to describe the form of teacher participation in political activities in Takalar South Sulawesi Province, (2) To determine the performance of the teachers who involved in political activities in Takalar, South Sulawesi, and (3) To determine the relationship between the participation of teachers in politics with the performance of teachers in the learning activities. The study population was a teacher in the Takalar District, and the sample of this research is the elementary school teachers, middle, and high school in a few districts in Takalar. The instrument used in this study was a questionnaire, interview guide, and observation records. The results showed that the forms of teacher participation in political activities in Takalar namely: the campaign, giving the election voice/party, public discussion, giving opinion in the media. Ther performance of the teachers involved in politics in Takalar are in the medium category, with an average of 68.35 mean score. It was found that there was not a significant correlation between the teachers' participation in politics and the their performance in the learning activities

Kata kunci:

Partisipasi politik, kinerja guru

PARTISIPASI politik, menurut Herbet Mc Closky yang dikutip oleh Damsar di dalam *Pengantar Sosiologi Politik* dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Max Weber, masyarakat melakukan aktivitas politik karena, pertama alasan rasional nilai, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Kedua, alasan emosional afektif, yaitu alasan didasarkan atas kebencian atau sukarela terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.

Miriam Budhiardjo (2008) mendefinisikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku, yakni: *apatist*, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik, *spectator*, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu, *gladiator*, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik, dan *pengkritik*, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional.

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri, di antaranya melalui pemberian suara (*voting behavior*), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya. Perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu, rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menandatangani pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Oleh karena itu, kekuasaan yang

dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu.

Partisipasi warga negara dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui partai politik, kampanye, pemberian suara dan lain-lain. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

Bagi pemerintah partisipasi politik dapat dikemukakan dalam berbagai fungsi. Pertama, partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Kedua, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Ketiga, sebagai sarana memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan organisasi sosial politik (orsospol) merupakan contoh dari fungsi politik lain.

Guru sebagai bagian dari masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi yang dilakukan bisa dalam bentuk partisipasi aktif ataupun partisipasi pasif. Namun demikian, perlu juga diperhatikan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena hal itu menjadi tujuan pokok dari seorang guru yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan suatu penelitian untuk melihat bentuk-bentuk partisipasi guru dalam kegiatan perpolitikan di Sulawesi Selatan dan dihubungkan dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk partisipasi guru dalam kegiatan perpolitikan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui kinerja guru yang terlibat dalam kegiatan perpolitikan di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
3. Untuk mengetahui hubungan antara partisipasi guru dalam politik dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran

KAJIAN TEORI

Partisipasi Politik

Secara etimologi terdiri atas dua kata yaitu partisipasi dan politik. Partisipasi dalam *Kamus Bahasa Indonesia* diartikan sebagai keikutsertaan; peran serta; ikut berperan dalam suatu kegiatan. Kata politik diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; segala

urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. (Pusat Bahasa Dep. Diknas, 2003).

Definisi lain dikemukakan oleh Miriam Budiharjo (2008;367) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan yang dimaksud meliputi tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, ikut serta dalam rapat umum suatu partai, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau menjadi salah satu anggota partai politik.

Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Herbert Mc Closky dalam Miriam Budiharjo (2008) dinyatakan bahwa *“The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy”*. Secara sederhana pendapat di atas dapat diartikan sebagai berikut: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Pengertian partisipasi politik di atas dapat dipahami sebagai suatu bentuk keikutsertaan masyarakat secara sukarela, baik dalam wujud keikutsertaan secara individu maupun kelompok dalam proses penentuan kebijakan yang bersifat umum, seperti dalam hal pemilihan pemimpin negara, kepala daerah bahkan kepala desa sekalipun.

Keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan yang terkait dengan pemerintahan dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Misalnya yang dikemukakan oleh Milbrath dan Goel (1977) yang membedakan partisipasi politik menjadi beberapa bentuk perilaku, yakni: *apatist*, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik; *spectator*, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu; *gladiator*, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik; *pengkritik*, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional.

Selanjutnya bentuk lain dikemukakan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson (1976) dalam Budiardjo (2008) melihat bentuk partisipasi politik masyarakat dalam empat bentuk, yaitu: Pertama, aktivis, yaitu calon pejabat publik, fungsionaris partai politik, pimpinan kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik dan teroris. Kedua, partisipan yaitu orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai politik, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis. Ketiga, penonton yaitu orang yang menghadiri kampanye suatu kelompok kepentingan, orang yang terlibat dalam diskusi politik, pemerhati dalam pembangun-

an politik, pemilih. Keempat, *apoliticals*, yaitu orang sama sekali tidak berpartisipasi dalam politik.

Kinerja Guru

Kata Kinerja merupakan kata yang sangat populer dalam mengukur efektivitas kegiatan atau program. Kata kinerja dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *performance* yang berarti prestasi kerja atau sesuatu yang dicapai. Menurut Ilyas (1999: 112), kinerja adalah penampilan hasil karya personel, baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi dan merupakan penampilan individu ataupun kelompok kerja personel. Deskripsi dari kinerja menyangkut 3 komponen penting, yaitu: (1) Tujuan. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan kerja. (2) Ukuran. Dibutuhkan ukuran apakah seorang personel telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk itu, kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personel memegang peranan penting. (3) Penilaian. Penilaian kinerja secara reguler yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap personel. Pengertian kinerja dengan deskripsi tujuan, ukuran operasional, dan penilaian reguler mempunyai peran penting dalam merawat dan meningkatkan motivasi personel.

Menurut teori Gibson yang dikutip oleh Ilyas (1999: 55-58), ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi perilaku kerja dan kinerja, yaitu: variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis.

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. Kinerja guru merupakan kulminasi dari tiga elemen yang saling berkaitan, yakni: keterampilan, upaya sifat keadaan, dan kondisi eksternal (Sulistyorini, 2001). Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa seseorang ke tempat kerja seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan-kecakapan antar pribadi serta kecakapan tehknik. Upaya tersebut diungkap sebagai motivasi yang diperlihatkan karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Sedangkan kondisi eksternal adalah tingkat sejauh mana kondisi eksternal mendukung produktivitas kerja.

Kinerja dapat dilihat dari beberapa kriteria, menurut Castetter (dalam Mulyasa, 2003) yang mengemukakan bahwa ada empat kriteria kinerja, yaitu: (1) karakteristik individu, (2) proses, (3) hasil, dan (4) kombinasi antara karakter individu, proses, dan hasil.

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan dengan keahliannya. Begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang tugasnya. Menempatkan guru sesuai dengan keahliannya secara mutlak harus dilakukan. Bila guru diberikan tugas tidak sesuai dengan keah-

liannya, akan berakibat menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan mereka. Juga akan menimbulkan rasa tidak puas pada diri mereka. Rasa kecewa akan menghambat perkembangan moral kerja guru. Menurut Pidarta (1999), moral kerja positif ialah suasana bekerja yang gembira, bekerja bukan dirasakan sebagai sesuatu yang dipaksakan melainkan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Moral kerja yang positif adalah mampu mencintai tugas sebagai suatu yang memiliki nilai keindahan di dalamnya. Jadi, kinerja dapat ditingkatkan dengan cara memberikan pekerjaan seseorang sesuai dengan bidang kemampuannya. Hal ini dipertegas oleh Munandar (1992) yang mengatakan bahwa kemampuan bersama-sama dengan bakat merupakan salah satu faktor yang menentukan prestasi individu, sedangkan prestasi ditentukan oleh banyak faktor di antaranya kecerdasan.

Kinerja juga dipengaruhi oleh kepuasan kerja yaitu perasaan individu terhadap pekerjaan yang memberikan kepuasan batin kepada seseorang sehingga pekerjaan itu disenangi dan digeluti dengan baik. Untuk mengetahui keberhasilan kinerja, perlu dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja dengan berpedoman pada parameter dan indikator yang ditetapkan, yang diukur secara efektif dan efisien seperti produktivitasnya, efektivitas menggunakan waktu, dana yang dipakai serta bahan yang tidak terpakai. Sedangkan evaluasi kerja melalui perilaku dilakukan dengan cara membandingkan dan mengukur perilaku seseorang dengan teman sekerja atau mengamati tindakan seseorang dalam menjalankan perintah atau tugas yang diberikan, cara mengomunikasikan tugas dan pekerjaan dengan orang lain.

Hal ini diperkuat oleh pendapat As'ad (1995) dan Robbins (1996) yang menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi kinerja seseorang, dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam kriteria, yaitu: (1) hasil tugas, (2) perilaku, dan (3) ciri individu. Evaluasi hasil tugas adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja individu dengan beberapa kriteria (indikator) yang dapat diukur. Evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan cara membandingkan perilakunya dengan rekan kerja yang lain dan evaluasi ciri individu adalah mengamati karakteristik individu dalam berperilaku ataupun bekerja, cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga dapat dikategorikan cirinya dengan ciri orang lain. Evaluasi atau penilaian kinerja menjadi penting sebagai *feed back* sekaligus sebagai *follow up* bagi perbaikan kinerja selanjutnya.

Pengukuran Kinerja Guru

Pengukuran kualitas kinerja dapat ditinjau dari beberapa indikator yang meliputi: (1) unjuk kerja, (2) penguasaan materi, (3) penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, (4) penguasaan cara-cara penyesuaian diri, (5) kepribadian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik (Sulistyorini, 2001).

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena guru mengemban tugas profesional artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab yang secara garis besar dapat dikelompokkan yaitu: (1) guru sebagai pengajar, (2) guru sebagai pembimbing, dan (3) guru sebagai administrator kelas. (Danim S., 2002).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja guru dapat didasarkan pada indikator kinerja guru berikut:

1. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar;
2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa;
3. Penguasaan metode dan strategi mengajar;
4. Pemberian tugas-tugas kepada siswa;
5. Kemampuan mengelola kelas;
6. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Guru

Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal ataupun faktor eksternal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru. Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja guru dapat diungkap antara lain:

1. Kepribadian dan dedikasi;
2. Pengembangan Profesi;
3. Kemampuan Mengajar;
4. Antar Hubungan dan Komunikasi;
5. Hubungan dengan Masyarakat;
6. Kedisiplinan;
7. Kesejahteraan;
8. Iklim Kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang terdiri atas dua variabel, yaitu: variabel partisipasi guru dalam politik dan variabel kinerja guru. Secara operasional variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut: Partisipasi guru dalam perpolitikan adalah keterlibatan guru dalam kegiatan politik, baik secara aktif maupun pasif seperti kampanye dan pemberian suara. Sedangkan kinerja guru berkaitan kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran yang terdiri atas kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah guru yang ada di Kabupaten Takalar. Pemilihan wilayah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini menghadapi pemilihan kepala daerah (Pemilukada), sehingga gambaran tentang data yang diharapkan berupa bentuk partisipasi politik guru dapat terlihat dengan lebih aktual dan akurat.

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara bertahap. Pertama, menentukan wilayah sampel secara purposive, yaitu menentukan daerah kecamatan yang memiliki jenjang pendidikan lengkap mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kedua, dari masing-masing kabupaten selanjutnya dipilih sekolah yang akan dijadikan sampel dengan menggunakan teknik random sampling. Ketiga, penentuan guru yang akan dijadikan sampel dilakukan secara aksidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara kebetulan. Maksudnya guru yang dijadikan sumber data adalah guru yang kebetulan berada di sekolah pada saat pengambilan data. Penentuan jumlah sampel dilakukan setelah mendapatkan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan yang ada pada wilayah Kabupaten Takalar. Guru yang dimaksud dalam hal ini adalah guru yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah sampel sekolah yang dijadikan sampel awalnya ditetapkan 9 sekolah, tapi karena alasan salah satu sekolah sedang dalam penilaian sehingga jumlah sampelnya hanya 8 sekolah, dengan komposisi 3 SD, 3 SMP, dan 2 SMA. Jumlah angket yang diedarkan sebanyak 80 angket. Setelah melalui proses pemeriksaan, sebagian angket tidak diisi secara lengkap, sehingga akhirnya jumlah sampel sebanyak 63 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket, dan observasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Pedoman wawancara, digunakan untuk mendapatkan data mengenai sejauhmana keterlibatan guru dalam politik pilkada. Data yang dimaksud merupakan pendalaman dari data yang telah diperoleh melalui angket. Instrumen tidak memuat daftar pertanyaan secara rinci, tetapi hanya berupa garis besar isi pertanyaan. Sebagian pertanyaan dikembangkan selama proses wawancara.
2. Angket dalam penelitian ini merupakan instrumen kunci. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai bentuk keterlibatan politik guru

dan data mengenai kinerja guru. Instrumen disusun berdasarkan indikator-indikator yang pengukuran pada tiap-tiap variabel. Angket ini diberikan kepada guru yang menjadi sampel penelitian.

3. Catatan observasi, digunakan selama kegiatan penelitian berlangsung. Kegiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisi sekolah secara umum, dan secara khusus situasi pembelajaran di kelas. Data ini dijadikan sebagai data pendukung terhadap data kinerja guru yang diperoleh melalui angket.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi guru dalam kegiatan perpolitikan dan kinerja guru. Statistika inferensial digunakan untuk menganalisis hubungan antara partisipasi guru dalam kegiatan perpolitikan dan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Partisipasi Politik Guru

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru-guru yang ada di Kabupaten Takalar dalam kaitannya dengan partisipasi politik disajikan berikut ini:

Partisipasi Guru sebagai Pejabat publik

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru-guru dalam kaitannya dengan partisipasi guru sebagai pejabat publik disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Partisipasi guru sebagai pejabat publik

	Fekkuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Pernah	2	3.2	3.2	3.2
Tidak Pernah	61	96.8	96.8	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Dari 63 guru yang menjadi responden yang disurvei, terdapat 2 orang atau 3,2 persen yang pernah menjadi pejabat publik dan sisanya yaitu 61 orang atau 96,8 persen tidak pernah menjadi pejabat publik.

Partisipasi dalam Bentuk Kampanye untuk Calon Pejabat/Partai Tertentu

Bentuk partisipasi guru dalam bentuk kampanye yaitu menjadi tim untuk mengkampanyekan calon pejabat/partai tertentu hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Partisipasi guru dalam bentuk kampanye

	Fekkuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Pernah	1	1.6	1.6	1.6
Tidak Pernah	62	98.4	98.4	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa partisipasi guru dalam hal kampanye bahwa dari 63 responden yang disurvei hanya terdapat 1 orang atau sekitar 1.6 persen yang pernah melakukan kampanye untuk calon pejabat/partai dan sisanya sebanyak 62 orang atau sekitar 98.4 persen yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam kegiatan kampanye.

Kampanye Sembunyi-sembunyi

Partisipasi guru dalam kegiatan kampanye yang tidak terang-terangan atau kampanye sembunyi-sembunyi hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Partisipasi guru dalam bentuk kampanye sembunyi-sembunyi

	Fekkuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Tidak Pernah	63	100.0	100.0	100.0

Tabel 3. menunjukkan bahwa dari 63 guru yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesemuanya tidak melakukan kegiatan kampanye secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dikuatkan oleh alasan bahwa mereka para guru memang tidak terlibat secara aktif pada kegiatan kampanye.

Untuk pertanyaan ini, ada beberapa guru yang awalnya tidak mau menjawabnya karena mengkhawatirkan dampak yang akan muncul dari jawaban tersebut. Peneliti kemudian menyampaikan bahwa nama responden dan nama sekolah tidak akan disebutkan, barulah kemudian mereka melanjutkan mengerjakan angket. Hasil angket ini kemudian dikonfrontir dengan hasil wawancara yang dilakukan secara tidak formal dengan beberapa guru, yang menyatakan bahwa mereka sebetulnya tidak mau terlibat terlalu jauh (terang-terangan) dalam pemilu karena adanya kekhawatiran terhadap nasib mereka setelah pemilu bila calon pasangan yang mereka dukung kalah. Sudah menjadi rahasia umum dalam politik pemilu dikenal adanya "politik balas budi". Artinya, karir atau promosi seorang PNS banyak ditentukan oleh sejauhmana dia terlibat dalam menyukseskan pasangan atau kepala daerah terpilih.

Partisipasi Menjadi Simpatisan Suatu Partai Politik

Bentuk partisipasi lain yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan politik adalah menjadi simpatisan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru-

guru yang ada di Kab. Takalar dalam hal partisipasi menjadi simpatisan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Partisipasi guru menjadi simpatisan suatu partai politik

	Fekkuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Pernah	6	9.5	9.5	9.5
Tidak Pernah	57	90.5	90.5	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari keseluruhan sampel yang dipilih terdapat 6 responden atau 9.5 persen guru-guru terlibat menjadi simpatisan partai politik dan selebihnya 57 responden atau sekitar 90.5 persen menyatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat sebagai simpatisan partai politik.

Partisipasi dalam Menghadiri Acara Kampanye Calon Pejabat Publik/ Partai Politik

Bentuk partisipasi guru yang juga menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah kehadiran guru-guru dalam acara kampanye calon pejabat publik atau partai politik. Hasil penelitian terkait dengan kehadiran guru dalam acara kampanye dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Partisipasi guru menghadiri kampanye calon pejabat publik/partai politik

	Fekkuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Jarang	11	17.5	17.5	17.5
Tidak Pernah	52	82.5	82.5	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari 63 responden yang diteliti terdapat 11 responden atau 17.5 persen guru menyatakan bahwa mereka jarang berpartisipasi dalam kegiatan kampanye calon pejabat publik atau partai politik. Sementara 52 responden atau 82.5 persen guru menyatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat menghadiri kegiatan kampanye calon pejabat publik atau partai politik.

Partisipasi dalam memberikan suara pada pilkada/partai

Hasil penelitian yang dilakukan dalam hal partisipasi guru dalam memberikan suara pada pemilihan kepala daerah atau pilkada serta partai politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Partisipasi guru dalam memberikan suara pada pilkada/partai

	Fekkuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Selalu	43	68.3	68.3	68.3
Sering	10	15.9	15.9	84.1
Jarang	2	3.2	3.2	87.7
Tidak Pernah	8	12.7	12.7	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa dari 63 responden yang diteliti dalam hal partisipasi guru dalam memberikan suara pada pilkada/politik menunjukkan bahwa 43 responden atau 68.3 persen guru-guru selalu memberikan suara pada pilkada/politik, 10 responden atau 15.9 persen sering memberikan suara pada pilkada/politik, 2 responden atau 3.2 persen guru jarang memberikan suara dan terdapat 8 responden atau 12.7 persen guru tidak pernah memberikan suara pada pilkada/politik.

Keterlibatan dalam Diskusi Politik Formal Seperti Seminar, Talkshow

Dalam hal partisipasi guru dalam diskusi politik formal, berikut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Keterlibatan guru dalam diskusi politik formal seperti seminar, talkshow

	Fekkuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Sering	1	1.6	1.6	1.6
Jarang	12	19	19	20.6
Tidak Pernah	50	79.4	79.4	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa partisipasi kegiatan politik guru dalam hal diskusi publik menunjukkan bahwa hanya ada 1 orang atau 1,6 persen guru yang sering terlibat dalam kegiatan diskusi publik, 12 orang atau 19 persen yang jarang dan terdapat 50 responden atau 79.4 persen guru tidak pernah terlibat dalam kegiatan diskusi publik terkait masalah politik.

Partisipasi dalam Diskusi Nonformal (Bincang-bincang Lepas dengan Orang Lain)

Hasil penelitian yang terkait dengan partisipasi guru dalam diskusi non-formal (bincang-bincang lepas dengan orang lain) dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 8. Partisipasi guru dalam diskusi nonformal (bincang-bincang lepas dengan orang lain)

	Fekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Selalu	3	4.8	4.8	4.8
Sering	13	20	20	25.4
Jarang	27	42.9	42.9	68.3
Tidak Pernah	20	13.7	13.7	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan pada tabel 8, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 63 responden yang diteliti terdapat 3 responden atau 4.8 % selalu melakukan diskusi nonformal, 13 responden atau 20 % sering melakukan diskusi nonformal, 27 responden atau 42.9 % responden menyatakan jarang melakukan diskusi non formal, dan terdapat 20 responden atau 31.7 % responde menyatakan tidak pernah melakukan diskusi nonformal dalam hal kegiatan perpolitikan.

Partisipasi dalam Membaca/Menonton Berita Politik

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru-guru dalam hal partisipasi mereka dalam membaca atau menonton berita politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Partisipasi guru dalam membaca/menonton berita politik

	Fekuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Selalu	12	19	19	19
Sering	31	49.2	49.2	68.3
Jarang	19	30.2	30.2	98.4
Tidak Pernah	1	1.6	1.6	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa dari 63 responden yang diteliti terdapat 12 responden atau 19 % guru menyatakan bahwa mereka selalu membaca atau menonton berita politik, 31 responden atau 49.2 % menyatakan sering, 19 responden atau 30.2 % responden menyatakan jarang, dan 1 responde atau 1.6 % menyatakan bahwa mereka tidak pernah membaca atau menonton berita tentang politik.

Partisipasi dalam Mengemukakan Opini Politik di Depan Audience (Seminar, Talkshow, PBM)

Hasil penelitian yang berkaitan dengan partisipasi guru dalam mengemukakan opini politik dalam kegiatan seminar, talkshow, dan proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Partisipasi dalam mengemukakan opini politik di depan audience

	Fekkuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Sering	1	1.6	1.6	1.6
Jarang	8	12.7	12.7	14.3
Tidak Pernah	54	85.7	85.7	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa dari 63 responden terdapat 1 responden yang sering mengemukakan opini politik dalam kegiatan seminar, talkshow, dan proses pembelajaran, sementara 8 responden atau 12.7 % yang jarang dalam kegiatan seminar, talkshow, dan proses pembelajaran, dan selebihnya 54 responden atau 85.7 % responden tidak pernah melakukan partisipasi dalam mengemukakan opini politik baik dalam kegiatan seminar, talkshow, dan proses pembelajaran.

Partisipasi dalam Mengemukakan Opini Politik di Media Massa

Hasil penelitian yang berkaitan dengan partisipasi guru dalam mengemukakan opini politik di media massa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Partisipasi guru dalam mengemukakan opini politik di media massa

	Fekkuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Sering	1	1.6	1.6	1.6
Tidak Pernah	62	98.4	98.4	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa dari 63 responden terdapat 1 responden yang sering mengemukakan opini politik di media massa, sementara 62 responden atau 98.4 persen yang tidak pernah melakukan partisipasi dalam mengemukakan opini politik di media massa.

Pendapat Guru Terkait dengan Kebijakan yang Diambil Pemerintah

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pendapat guru mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12. Pendapat guru terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah

	Fekkuensi	Persentase	Persentase Valid	Persentase Kumulatif
Valid Ya	13	20.6	2.6	2.6
Tidak Pernah	50	79.4	79.4	100.0
Total	63	100.0	100.0	

tabel 12 berikut menunjukkan bahwa dari 63 responden yang diteliti, terdapat 13 responden atau 20.6 persen menyatakan setuju dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan selebihnya sebanyak 50 responden atau 79.4 persen yang menyatakan tidak setuju dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Deskripsi Kinerja Guru

Salah satu variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kinerja guru. Data terkait kinerja guru diambil dengan menggunakan angket dengan model skala likert. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru di Kabupaten Takalar secara deskriptif di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 13. Statistik deskriptif tentang kinerja guru

	N	Min	Maks	Sum	Mean	Std. Dev	Variance
Kinerja Guru	63	54	77	4306	68.35	5.469	29.908
Valid N	63						

Dari tabel 13 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja guru adalah 68.35 dengan standar deviasi 5.469.

Dengan menggunakan kategorisasi berikut:

Tabel 14. Kategorisasi kinerja guru

tinggi	69.00	s/d	92.00
sedang	46.00	s/d	69.00
rendah	23.00	s/d	46.00

Berdasarkan tabel kategorisasi di atas, maka kinerja guru dapat dikategorikan **Sedang** dengan nilai rata-rata 68.35.

Hubungan Antara Partisipasi Politik dengan Kinerja Guru

Untuk melihat hubungan antara partisipasi politik dan kinerja guru dianalisis dengan menggunakan *Crosstab*. Adapun hasil analisis dapat disajikan sebagai berikut:

Hubungan antara Partisipasi Politik Guru dalam Kegiatan Kampanye dengan Kinerja Guru.

Untuk mengetahui hubungan antara partisipasi politik dalam kegiatan kampanye dengan kinerja guru dengan menggunakan *statistic Chi-square test*.

Tabel 15. Uji Chi Squared hubungan antara partisipasi politik guru dalam kegiatan kampanye dengan kinerja guru

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	21.309 ^a	18	.264

Likelihood Ratio	23.046	18	.189
Linear-by-Linear Association	.309	1	.578
N of Valid Cases	63		

a. 36 cells (94.7%) have expected count less than 5.
The minimum expected count is .17.

Berdasarkan tabel 15 *Chi-Square Test* di atas, nilai *p-value pearson Chi-Square* yaitu $0.264 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara partisipasi guru dalam kegiatan kampanye politik dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran.

Hubungan antara Partisipasi Politik Guru dalam Memberikan Suara dengan Kinerja Guru.

Untuk mengetahui hubungan antara partisipasi politik dalam memberikan suara pada pilkada/partai dengan kinerja guru dengan menggunakan *statistic Chi-square test*.

Tabel 16. Uji Chi Square hubungan antara partisipasi politik guru dalam memberikan suara dengan kinerja guru

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	70.782 ^a	54	.062
Likelihood Ratio	55.537	54	.417
Linear-by-Linear Association	1.751	1	.186
N of Valid Cases	63		

a. 74 cells (97.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

Berdasarkan tabel *Chi-Square Test* di atas, nilai *p-value pearson Chi-Square* yaitu $0.062 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara partisipasi guru dalam kegiatan pemberian suara pada pilkada/partai dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran.

Hubungan antara Partisipasi Politik Guru dalam Kegiatan Diskusi Politik dengan Kinerja Guru.

Untuk mengetahui hubungan antara partisipasi politik guru dalam kegiatan diskusi politik dengan kinerja guru dengan menggunakan *statistic Chi-square test*.

Tabel 17 Uji *Chi Square* hubungan antara partisipasi politik guru dalam kegiatan diskusi politik dengan kinerja guru

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	30.608 ^a	36	.723
Likelihood Ratio	22.451	36	.962
Linear-by-Linear Association	.022	1	.883
N of Valid Cases	63		

a. 55 cells (96.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.

Berdasarkan tabel *Chi-Square Test* di atas, nilai *p-value pearson Chi-Square* yaitu $0.723 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hubungan antara partisipasi guru dalam kegiatan diskusi politik baik formal maupun nonformal dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran.

Hubungan antara Partisipasi Politik Guru dalam Kegiatan Mengemukakan Opini Publik dengan Kinerja Guru.

Untuk mengetahui hubungan antara partisipasi politik dalam kegiatan mengemukakan opini publik dengan kinerja guru dengan menggunakan *statistic Chi-square test*.

Tabel 18. Uji *chi square* hubungan antara partisipasi politik guru dalam kegiatan mengemukakan opini publik dengan kinerja guru

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	80.340 ^a	36	.000
Likelihood Ratio	27.996	36	.827
Linear-by-Linear Association	.135	1	.713
N of Valid Cases	63		

a. 55 cells (96.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.

Berdasarkan tabel *Chi-Square Test* di atas, nilai *p-value pearson Chi-Square* yaitu $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara partisipasi guru dalam kegiatan mengemukakan opini publik dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran.

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat, khususnya guru dalam kegiatan politik ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang menjadi alat ukur di antaranya adalah keterlibatan guru dalam kegiatan kampanye, pemberian suara pada pemilihan kepala daerah, dan kegiatan diskusi politik. Namun, ternyata ketika guru mengemukakan opini lewat audiens seperti seminar, talkshow, dan kegiatan pembelajaran ternyata memberikan hubungan secara signifikan terhadap kegiatan pembelajaran.

Hal yang menurut peneliti penting untuk diperhatikan dalam proses penelitian ini yaitu kekhawatiran guru (mungkin lebih tepatnya ketakutan) terhadap semua hal yang berusaha mencari tahu tentang keterlibatan guru dalam politik. Hal ini terlihat, dari sejumlah pertanyaan yang muncul setiap akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus kepada keterlibatan guru dalam politik. Kekhawatiran guru ini menjadi hal yang wajar jika melihat kenyataan yang ada pada negara kita, di mana karir dan promosi guru banyak ditentukan oleh seberapa besar sumbangsih seseorang dalam menyukseskan seseorang pemimpin, begitupula sebaliknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk partisipasi guru dalam kegiatan perpolitikan di Kabupaten Takalar yaitu kampanye, pemberian suara pilkada/partai, diskusi publik, dan mengemukakan opini di media massa.
2. Kinerja guru-guru yang terlibat dalam kegiatan perpolitikan di Kabupaten Takalar berada dalam kategori sedang dengan rata-rata kinerja guru sebesar 68.35.
3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara partisipasi guru dalam politik dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan potensi guru dalam mensosialisasikan kegiatan perpolitikan di sekolah-sekolah.
2. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, maka disarankan agar pengelolaan guru dikembalikan ke pemerintah pusat. Untuk memberi ruang kepada guru dalam mengembangkan karirnya sebagai guru dan menyalurkan hak

politiknya (memilih pemimpin) tanpa dihantui rasa takut akan keberlangsungan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- As'ad, Moh. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Ed. Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Danim S. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- David F. Roth dan Frank L. Wilson. *The Comparative Study of Politics*. ed ke-2, Boston: Mifflin Company, 1976.
- Davis, K. & Newstrom, J.W. *Perilaku dalam Organisasi*. Edisi ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Denny Suwarja. *KBK, Tantangan Profesionalitas Guru*. 19 Juli 2003. Artikel. Homepage Pendidikan Network, 2003.
- Dimock, Marshal Edward & Dimock, Gladys Ogden. *Administrasi Negara*. Terjemahan oleh Husni Tamrin Pane. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Drost. *Sekolah: Mengajar atau Mendidik ?*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Freud, S. *The ego and the id*. London: The Hogarth Press, 1950.
- Hasan, Ani M, *Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pengetahuan*, Artikel. Homepage Pendidikan Network, 2001.
- Henry Nicholas. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik*. Terj. Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.
- Ilyas, Y. *Kinerja*, Cet. I; Depok: Badan Penerbit FKM Universitas Indonesia, 1999.
- Imron. *Pembinaan Guru di Indonesia*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Kohler, Jerry. W., Anatol, karl W. E dan Applbaum, Ronald L. 1981. *Organizational Communication: Behavioral Perspective*. New York: Holt Rinehart and Winstons.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Maister. *True Professionalism*. New York: The Free Press, 1997.
- Milbrath, L dan M. Goel. *Political Participation: How and Why do People Get Involved in Politics*. Ed. Ke 2. Chicago, Illinois: Rind Mc Mally, 1997.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.

-
- Nasanius, Y. *Kemerosotan Pendidikan Kita: Guru dan Siswa yang Berperan Besar, Bukan Kurikulum*. Suara Pembaharuan. (Online), <http://www.suarapembaruan.com/News/081998/08Opini>, 1998.
- Owens. *Organisational Behavior in education*. Bonston: Allyn and Bacon, 1991.
- Pidarta. *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1999.
- Robbins, S.P. *Organization Behavior: Concep-Contraversies Application*. New Jersey: Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc, 1996.
- Semiawan. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: Grasindo, 1991.
- Sulistiyorini. "Hubungan antara Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi dengan Kinerja Guru". *Ilmu Pendidikan*: 28 (1). 2001.
- Supriadi. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1999.
- Suryabrata. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sutaryadi. *Administrasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 2001.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru yang Profesional*. Edisi Kedua. Bandung: Remadja Rosdakarya, 2002.
- Vogel, Ezra F. Birokrasi yang Dipolitisir: Cina Komunis; dalam Riggs Fred W. (editor). *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi*. Ter. Luqman Hakim, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Wilson, Woodrow, 1987. The study of Administration, *Political science Quarterly*, Vol.2 No.2: 197-122.
- Zahera Sy. "Hubungan Konsep Diri dan Kepuasan Kerja dengan Sikap Guru dalam Proses Belajar Mengajar", *Ilmu Pendidikan*, jilid 4 Nomor 3, 1997.